

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya gotong royong merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang telah diwariskan turun-temurun di masyarakat. Sebagai bentuk kerja sama dan solidaritas sosial, gotong royong memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat kemandirian masyarakat, khususnya di desa-desa. Pemerintahan desa sebagai entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran krusial dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong ini dalam setiap program dan kegiatan pembangunan. Namun, di tengah perkembangan zaman dan modernisasi, fenomena pudarnya budaya gotong royong semakin sering dijumpai, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa.

Menurut Iman (2018:78) berpendapat bahwa gotong royong menjadi strategi dalam pola hidup bersama yang saling meringankan beban dalam suatu kebutuhan sosial. Artinya bahwa kegiatan gotong royong merupakan kegiatan yang wajib dilestarikan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu gotong royong yang dalam kegiatannya melibatkan kerja sama diantara masyarakat memperkuat partisipasi warga negara (*civic participation*), sebab partisipasi warga dalam kegiatan royong berdasarkan rasa tanggung jawab sebagaimana *civic participation* yang merupakan kemampuan berpartisipasi warga negara yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Adanya rasa tanggung jawab mendorong warga untuk berperan serta dalam kegiatan di lingkungan masyarakat.

Seiring dengan arus globalisasi, kemajuan teknologi, dan pergeseran gaya hidup masyarakat, budaya gotong royong di desa perlahan mengalami perubahan. Modernisasi telah mendorong lahirnya sikap individualisme yang cenderung mengurangi semangat kebersamaan dalam masyarakat. Terlebih lagi, banyak program pemerintah yang awalnya berbasis partisipasi masyarakat secara gotong royong kini lebih banyak dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu atau dikelola secara individual.

Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan tugas pemerintah desa yang sebelumnya berbasis kebersamaan.

Pada dasarnya gotong royong merupakan asas suatu tata kehidupan dan penghidupan Indonesia asli dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana lalu mengurai menjadi Pancasila. Maka kandungan nilai-nilai gotong royong pula tersimpan dalam dasar negara Indonesia yang menjadi pembentuk falsafah Pancasila meliputi nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan dan toleransi. (Journal et al., 2023).

Pudarnya budaya gotong royong ini dapat berdampak serius pada kinerja pemerintah desa dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengakibatkan program-program yang dijalankan pemerintah desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, lemahnya keterlibatan masyarakat juga dapat mengakibatkan meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan eksternal, sehingga kemandirian desa berkurang dan tujuan pembangunan berkelanjutan sulit tercapai.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, termasuk budaya gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya individualisme, budaya gotong royong di banyak desa mulai mengalami kemunduran. Perubahan gaya hidup, arus globalisasi, serta pergeseran nilai-nilai sosial menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kebersamaan. Pemerintah desa sering kali kesulitan menggerakkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kolektif seperti kerja bakti, pembangunan infrastruktur desa, atau bantuan sosial.

Kegiatan yang umum terjadi misalnya dalam kegiatan pembangunan jalan desa atau pembersihan lingkungan, yang dahulu secara sukarela dilakukan oleh warga secara bergiliran, kini cenderung bergantung pada tenaga upahan

atau proyek pemerintah. Di beberapa desa, kegiatan kerja bakti hanya diikuti oleh segelintir orang, sementara sebagian besar warga memilih untuk tidak terlibat dengan alasan kesibukan atau merasa tidak ada keuntungan langsung. Situasi ini mencerminkan pudarnya semangat gotong royong yang dulunya menjadi kekuatan utama dalam membangun desa. Pemerintah desa dihadapkan pada tantangan besar untuk menghidupkan kembali nilai-nilai tersebut melalui pendekatan edukatif, regulatif, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Perubahan budaya gotong royong di desa-desa, termasuk Desa Hiligara di Kecamatan Gunungsitoli Selatan, merupakan fenomena sosial yang terjadi akibat pengaruh modernisasi, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat sehingga mendorong lahirnya pola hidup yang lebih individualistik. Hal ini terlihat dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti, pembangunan fasilitas umum, maupun kegiatan adat. Misalnya, berdasarkan data Kementerian Desa PDTT (2023), tercatat bahwa lebih dari 45% desa di Indonesia mengalami penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dalam lima tahun terakhir. Fenomena ini juga terjadi di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, di mana kegiatan kerja bakti yang dulunya rutin diikuti hampir seluruh warga, kini hanya dihadiri oleh sebagian kecil masyarakat. Gotong royong yang dahulu menjadi bagian penting dari identitas kolektif masyarakat kini semakin tergerus oleh budaya individualisme dan orientasi ekonomi. Dalam kondisi ini, peran pemerintah desa menjadi sangat krusial untuk mempertahankan dan merevitalisasi semangat gotong royong. Pemerintah desa dapat berperan sebagai fasilitator kegiatan sosial, penggerak partisipasi masyarakat, serta pembuat kebijakan lokal yang mendorong kolaborasi antarwarga, misalnya melalui program padat karya, kerja bakti terjadwal, dan kegiatan adat berbasis komunitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Lase (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian nilai gotong royong sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan desa dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan

pembangunan. Di Desa Hiligara, pemerintah desa diharapkan tidak hanya menjadi pengatur administrasi, tetapi juga sebagai agen pelestarian budaya. Dengan membangun komunikasi yang aktif dan pendekatan partisipatif, pemerintah desa dapat membangkitkan kembali kesadaran kolektif tentang pentingnya gotong royong dalam membangun desa secara berkelanjutan. Kegiatan gotong royong tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga dapat menjadi strategi pembangunan yang murah, efisien, dan mempererat ikatan sosial antarwarga.

Berbagai faktor dapat memengaruhi pudarnya budaya gotong royong ini, antara lain perubahan sosial, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, serta kebijakan desa yang kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi penyebab utama tergerusnya budaya gotong royong di lingkungan pemerintahan desa dan implikasinya terhadap efektivitas pelayanan publik serta kualitas kehidupan masyarakat desa.

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab dan dampaknya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang dapat mempertahankan dan memperkuat nilai gotong royong di tengah masyarakat, guna mendukung terciptanya desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Berdasarkan hasil observasi adapun fenomena yang terjadi "Fenomena Pudarnya Budaya Gotong Royong, Perubahan Sosial, Tekanan Ekonomi, Perkembangan Teknologi, Serta Kebijakan Desa Yang Kurang Mengakomodasi Partisipasi Masyarakat."

Gotong royong adalah bentuk solidaritas sosial di mana anggota masyarakat saling membantu tanpa pamrih dalam menyelesaikan pekerjaan bersama. Ini merupakan nilai luhur budaya Indonesia, khususnya di lingkungan pedesaan, yang mencerminkan kekuatan sosial dan kebersamaan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, budaya gotong royong mengalami penurunan atau bahkan "pudar" karena berbagai perubahan sosial dan ekonomi, contohnya

dulu warga secara sukarela melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan desa. Namun kini, kegiatan itu nyaris tidak pernah dilakukan. Jika ada jalan rusak, warga lebih memilih mengeluh atau menunggu bantuan dari pemerintah, bukan memperbaikinya bersama-sama.

Perubahan sosial adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur, fungsi, dan pola-pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa mencakup nilai, norma, perilaku, lembaga sosial, bahkan hubungan antarmanusia. Kemudian Perubahan sosial tidak bisa dihindari, terutama di era globalisasi dan digital seperti sekarang. Namun, penting bagi masyarakat untuk mampu beradaptasi sambil tetap menjaga nilai-nilai budaya lokal agar jati diri bangsa tidak hilang di tengah arus modernisasi. Contohnya Perubahan Pola Komunikasi yang dimana dulu masyarakat berinteraksi secara langsung, seperti mengunjungi rumah tetangga atau mengadakan pertemuan di balai desa. sedangkan sekarang komunikasi dilakukan lewat media sosial dan grup whatsapp, sehingga interaksi tatap muka semakin jarang.

Tekanan ekonomi adalah kondisi ketika individu, keluarga, atau masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Tekanan ini bisa bersifat sementara (krisis) atau jangka panjang (struktural). Tekanan ekonomi seringkali berdampak langsung terhadap kualitas hidup, stabilitas sosial, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya di sebuah desa, ada program gotong royong untuk memperbaiki jembatan. Namun, hanya sedikit warga yang ikut karena kebanyakan harus mencari nafkah harian di pasar atau kota. Mereka tidak punya waktu karena “kalau tidak kerja, tidak makan.

Perkembangan teknologi adalah proses kemajuan dan pembaruan alat, sistem, dan metode yang digunakan manusia untuk mempermudah aktivitas dan memenuhi kebutuhannya. Teknologi berkembang pesat dari waktu ke waktu, mencakup berbagai bidang seperti komunikasi, transportasi, pendidikan, kesehatan, industri, dan pertanian. Contohnya pendidikan dan pembelajaran.

Dulu belajar hanya bisa di sekolah secara tatap muka, sekarang pembelajaran bisa dilakukan secara daring (online), melalui beberapa platform media sosial seperti *Google Classroom*, *Zoom*, dan *YouTube*.

Kebijakan desa yang kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat adalah kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan atau mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan warga desa secara menyeluruh. Akibatnya, program atau keputusan yang diambil kurang tepat sasaran, tidak didukung masyarakat, bahkan bisa menimbulkan konflik atau ketidakpuasan. Contohnya pembangunan yang dilakukan dianggap kurang tepat misalnya pemerintah desa membangun gedung serbaguna menggunakan dana desa tanpa melalui musyawarah yang melibatkan warga. Warga sebenarnya lebih membutuhkan perbaikan saluran irigasi dan jalan tani, karena itu berkaitan langsung dengan sumber penghasilan mereka (bertani). Setelah pembangunan selesai, gedung jarang digunakan dan terbengkalai. Warga menganggap dana tersebut sia-sia, dan kepercayaan terhadap perangkat desa menurun. Kebijakan desa seharusnya bersifat partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan umum. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) akan membuat program desa lebih tepat sasaran, mendapat dukungan, dan meningkatkan rasa memiliki dari warga.

Perubahan sosial, tekanan ekonomi, dan kurangnya regulasi desa yang partisipatif semakin mempercepat pudarnya budaya gotong royong. Masyarakat cenderung lebih memilih mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan bersama. Pemerintah desa pun sering menghadapi tantangan besar dalam menggerakkan warganya untuk terlibat aktif dalam pembangunan, sehingga banyak program desa yang tidak optimal. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan melemahkan kohesi sosial, menurunkan rasa solidaritas, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Dalam konteks ini, pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, motivator, sekaligus inovator dalam membangun kesadaran kolektif

masyarakat. Pemerintah desa dituntut mampu mengembangkan kebijakan partisipatif, menggerakkan masyarakat melalui pendekatan persuasif, serta menciptakan program pembangunan berbasis gotong royong yang adaptif dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian mengenai “Peran Pemerintah Desa dalam Menghadapi Perubahan Budaya Gotong Royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan” menjadi penting dilakukan untuk menganalisis peran yang telah dijalankan, faktor penghambat, serta strategi yang dapat diterapkan untuk merevitalisasi nilai gotong royong.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana peran pemerintah desa dalam menghadapi perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mempertahankan budaya gotong royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan, serta bagaimana pemerintah desa dapat mengatasinya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam mempertahankan budaya gotong royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

2. Untuk mengidentifikasi saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan, serta bagaimana pemerintah desa dapat mengatasinya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), setiap penelitian memiliki nilai teoritis dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai manajemen pemerintahan desa dan pelestarian budaya lokal.
2. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik terkait peran pemerintah desa dan perubahan sosial di masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Selain untuk tujuan dilakukannya penelitian , kesimpulan yang diperoleh diharapkan dapat dipergunakan baik oleh peneliti maupun lembaga/tempat penelitian antara lain :

1. Bagi Peneliti

Sebagai wadah dalam meningkatkan *knowledge* atau pengetahuan , menambah pengalaman peneliti tentang perbandingan antara kondisi objektif di lapangan dan teori-teori yang telah dipelajari sehingga adanya pemahaman mengenai kesenjangan antara teori dan terapan yang sesungguhnya secara praktis.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nias

Sebagai penambah referensi terkait hasil penelitian yang telah diperoleh mahasiswa.

3. Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai *input* dan tolak ukur dalam membuat kebijakan, terlebih mengenai peran pemerintah desa dalam menghadapi perubahan budaya gotong royong.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih jauh khususnya seputar tentang peran pemerintah desa dalam menghadapi perubahan budaya gotong royong.